

RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH

BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2020-2024



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Program Kerja Jangka Menengah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, sebagai penjabaran dari aktivitas selama 5 tahun pelaksanaan kegiatan dan merupakan amanat Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Bahwa Setiap Satuan Kerja perlu menyusun Rencana Program Kerja Jangka Menengah, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun. Rencana Program Kerja Jangka Menengah memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2020-2024, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya BNN Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Merencanakan Program P4GN.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di BNN Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sulawesi Tengah



MONANG SITUMORANG, S.H., M.Si.

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan P4GN di Sulawesi Tengah dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis dan perkembangan baru lainnya sebagai berikut :

1. Kasus Tindak Pidana Narkoba

Capaian kinerja pemberantasan BNNP Sulawesi Tengah selama ini cenderung melebihi target yang ditentukan. Berdasarkan data LKIP BNNP Sulawesi Tengah, di tahun 2019, yaitu sebanyak 61 berkas perkara yang P-21 dari target 19, dan di tahun 2020 sebanyak 50 berkas perkara yang P-21 dari target 15.

2. Penyalahguna Yang Lapori Diri atau Voluntary

Data penyalahguna yang lapori diri atau voluntary di wilayah BNNP Sulawesi Tengah pada tahun 2020 adalah sebesar 688 orang yang dilayani oleh fasilitas rehabilitasi yang ada di wilayah provinsi Sulawesi Tengah.

3. Fasilitas Layanan Rehabilitasi (LRIP dan LRKM)

Data fasilitas layanan rehabilitasi baik LRIP maupun LRKM adalah sebagaimana pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1. Data Jumlah Fasilitas Layanan Rehabilitasi (LRIP dan LRKM)
Masing-Masing Satuan Kerja di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

| No | Satuan Kerja | LRIP | LRKM |
|----|------------------------|-----------|----------|
| 1 | BNNP Sulawesi Tengah | 2 | 0 |
| 2 | BNN Kota Palu | 1 | 2 |
| 3 | BNNK Donggala | 3 | 1 |
| 4 | BNNK Poso | 5 | 1 |
| 5 | BNNK Tojo una-una | 1 | 0 |
| 6 | BNNK Morowali | 3 | 0 |
| 7 | BNNK Banggai Kepulauan | 3 | 0 |
| | TOTAL | 18 | 4 |

4. Fasilitas IPWL

Bahwa untuk menjamin hak pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial, dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis yang didahului dengan proses wajib lapor. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Data fasilitas IPWL di wilayah provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 9 IPWL yang aktif yaitu :

1. Klinik Mosipakabelo BNNP Sulteng
 2. Klinik Sangurara BNN Kota Palu
 3. Klinik Naka Madonde BNNK Poso
 4. R.S. Madani
 5. R.S. Anutapura
 6. R.S. Undata
 7. R.S. Bayangkara
 8. Bidokkes Polda Sulteng
 9. Yayasan Nusantara Kel. Kabonena
5. Penyalahguna narkoba yang telah mendapat layanan rehabilitasi

Pelaksanaan layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020 telah melakukan layanan rehabilitasi sebanyak 688 orang.

6. Penghuni lepas kasus penyalahgunaan narkoba

Data penghuni lepas di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah kasus penyalahgunaan narkoba tahun 2020 adalah sebanyak 484 orang.

7. Kondisi Demografi Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar di Pulau Sulawesi. Daerah ini terkenal akan keberadaan teluk-teluk indah dan pulau yang cantik. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, mulai dari pertanian, perikanan, pertambangan hingga perkebunan.

Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk melalui Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964. Wilayah Sulawesi Tengah memiliki luas 61.841,29 kilometer persegi atau setara 3,2 persen dari luas Indonesia. Populasi penduduknya mencapai 3,05 juta jiwa pada 2019. Secara administratif provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu ini terdiri atas 12 kabupaten, 1 kota, 175 kecamatan, dan 2.020 desa/kelurahan.

Adapun jumlah sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di wilayah Sulawesi Tengah adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Data Jumlah Sekolah (Negeri dan Swasta) dan Perguruan Tinggi Masing-Masing Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

| Kabupaten/Kota | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | SMK | Perguruan Tinggi |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| Palu | 191 | 74 | 40 | 25 | 18 |
| Donggala | 374 | 123 | 38 | 13 | 0 |
| Toli-Toli | 247 | 96 | 32 | 14 | 4 |
| Buol | 176 | 79 | 18 | 9 | 0 |
| Sigi Biromaru | 282 | 96 | 37 | 12 | 0 |
| Parigi Moutong | 461 | 158 | 53 | 21 | 0 |
| Poso | 245 | 82 | 25 | 16 | 3 |
| Tojo Una-Una | 193 | 66 | 21 | 7 | 0 |
| Morowali | 158 | 50 | 16 | 10 | 1 |
| Morowali Utara | 156 | 52 | 14 | 9 | 0 |
| Banggai | 391 | 152 | 62 | 25 | 3 |
| Banggai Kep. | 166 | 71 | 23 | 16 | 0 |
| Banggai Laut | 85 | 49 | 14 | 8 | 0 |
| TOTAL | 3.125 | 1.148 | 393 | 185 | 29 |

8. SDM BNN di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Data Jumlah Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah beserta BNNK Jajaran adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Data Jumlah Personil Masing-Masing Satuan Kerja di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

| Satuan Kerja | ASN | | Polri | TKK | Jumlah |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | Organik | DPK | | | |
| BNNP Sulawesi Tengah | 37 | 4 | 12 | 25 | 78 |
| BNN Kota Palu | 24 | 0 | 8 | 13 | 45 |
| BNNK Donggala | 11 | 2 | 6 | 14 | 33 |
| BNNK Poso | 17 | 3 | 4 | 14 | 38 |
| BNNK Tojo Una-Una | 4 | 12 | 4 | 14 | 34 |
| BNNK Morowali | 19 | 1 | 3 | 13 | 36 |
| BNNK Banggai Kep. | 8 | 1 | 1 | 15 | 25 |
| TOTAL | 120 | 23 | 38 | 108 | 289 |

9. Sarana Prasarana Perkantoran (gedung kantor milik sendiri, sewa atau pinjam pakai)

Sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan BNN Provinsi Sulawesi Tengah dan BNNK jajaran terdapat satuan kerja yang sudah memiliki gedung sendiri tetapi masih ada juga kantor yang masih disewa sesuai dengan data pada tabel berikut :

Tabel 4. Daftar Status Kepemilikan Gedung Kantor

| SATUAN KERJA | STATUS PEMILIKAN KANTOR | KETERANGAN |
|---------------------|--------------------------------|--|
| BNNP SULTENG | Sewa | Kantor milik sendiri rusak berat akibat bencana gempa bumi |
| BNN KOTA PALU | Sewa | Belum mempunyai kantor sendiri |
| BNNK DONGGALA | Milik Sendiri | |
| BNNK POSO | Milik Sendiri | |
| BNNK TOJO UNA-UNA | Sewa | Belum mempunyai kantor sendiri |
| BNNK MOROWALI | Milik Sendiri | |
| BNNK BANGGAI KEP. | Sewa | Belum mempunyai kantor sendiri |

10. Sarana klinik BNNP dan BNNK

Kantor Badan Narkotika Nasional baik BNNP maupun BNNK/Kota masing-masing sudah memiliki klinik untuk melayani pasien rehabilitasi narkotika rawat jalan. Adapun data klinik tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. Daftar Nama Klinik Masing-Masing Satker

| SATUAN KERJA | NAMA KLINIK |
|---------------------|----------------------------|
| BNNP SULTENG | “KLINIK MOSIPAKABELO” |
| BNN KOTA PALU | “KLINIK SANGURARA” |
| BNNK DONGGALA | “KLINIK BAHAGIA” |
| BNNK POSO | “KLINIK NAKA MADONDE” |
| BNNK TOJO UNA-UNA | “KLINIK MUSAMPE SUVU PURA” |
| BNNK MOROWALI | “KLINIK PRATAMA” |
| BNNK BANGGAI KEP. | “KLINIK MONTOLUTUSAN” |

11. Data Senjata Api

Senjata api dan amunisi merupakan salah satu asset penting dalam rangka pelaksanaan tugas pemberantasan penyalahgunaan narkotika di suatu wilayah. BNN Provinsi Sulawesi Tengah beserta BNNK jajaran memiliki asset senjata api dan amunisi dengan jumlah sebagaimana data berikut :

Tabel 6. Data Jumlah Senjata Api Dan Rompi Anti Peluru

| SATUAN KERJA | Senjata Api | | Rompi Anti Peluru |
|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | Laras Panjang | Laras Pendek | |
| BNNP SULTENG | 18 | 34 | 20 |
| BNN KOTA PALU | 2 | 5 | 0 |
| BNNK DONGGALA | 2 | 3 | 12 |
| BNNK POSO | 2 | 4 | 17 |
| BNNK TOJO UNA-UNA | 1 | 3 | 0 |
| BNNK MOROWALI | 1 | 3 | 0 |
| BNNK BANGGAI KEP. | 1 | 3 | 0 |
| TOTAL | 27 | 55 | 49 |

12. Capaian dan Evaluasi Kinerja Periode Sebelumnya

Pencapaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah di Tahun 2020 adalah jumlah indikator kinerja kegiatan yang capaiannya $\geq 100\%$ adalah 10 IKK (83%), jumlah IKK yang capaiannya $\leq 85\%$ sampai $< 100\%$ adalah 1 IKK (8,5%), dan jumlah IKK yang capaiannya $\leq 55\%$ sampai $< 70\%$ adalah 1 IKK (8,5%).

Sementara untuk anggaran tahun 2020 dari total Rp. 16.084.059.000 terrealisasi sebesar Rp. 15.514.424.162 atau sebesar 96,5%.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi operasional BNNP Sulawesi Tengah pada periode 2020-2024.

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

a. Secara internal

- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Sumber Daya Manusia yang bisa diandalkan dalam menjalankan Program P4GN.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah memiliki “Klinik Mosipakabelo” yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam memberikan pelayanan rehabilitasi kepada para korban penyalahgunaan narkoba.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah mampu memanfaatkan fasilitas media sosial yang beragam dalam memberikan Informasi dan edukasi tentang bahaya dan resiko penyalahgunaan narkoba.

b. Secara Eksternal

- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan perjanjian kerja sama diberbagai instansi pemerintah maupun instansi swasta dalam penanggulangan narkoba di lingkungan kerjanya.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki Satgas Anti Narkoba dalam mendukung dan mensukseskan program P4GN di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada BNN dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba di wilayah Sulawesi Tengah.
- Semakin meningkatnya peran serta masyarakat melaporkan peredaran gelap narkoba yang ada disekitar lingkungannya.
- Terlaksananya peningkatan kemampuan Agen Pemulihan di lembaga IBM

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Sulawesi Tengah dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Anggaran Penyelidikan dan Penyidikan dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba yang masih belum memadai.
- b. Masih kekurangan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas.
- c. Masih kekurangan sarana dan prasarana

- d. Belum adanya pengganti gedung kantor yang rusak akibat bencana gempa bumi yang terjadi di Kota Palu pada tahun 2018 silam.
- e. Masih rendahnya pengawasan peredaran narkoba baik di Lembaga Masyarakatan maupun di jalur-jalur masuk tidak resmi maupun resmi baik di darat dan laut.
- f. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan wajib lapor bagi penyalah guna narkoba.
- g. Daya tarik nilai ekonomi yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba bahkan menjadikan mata pencaharian utama walaupun memiliki resiko hukum yang sangat tinggi.
- h. Masih terdapat masyarakat yang cenderung menutupi bahkan melindungi adanya penyalahgunaan narkoba di masyarakat sekitar atau dikeluarganya.
- i. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk program dan sumber daya anggaran dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sulawesi Tengah merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. Penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;

4. Peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Sulawesi Tengah juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi Sulawesi Tengah sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan media sosial yang ada dalam rangka penyebaran informasi dan edukasi tentang bahaya dan resiko penyalahgunaan narkotika serta pelayanan publik.
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam penanggulangan narkotika di lingkungan kerjanya.
3. Peningkatan kemampuan agen pemulihan dalam pelaksanaan rehabilitasi di lembaga IBM.
4. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan tentang P4GN.
5. Meningkatkan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Provinsi.

Rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Sulawesi Tengah merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun rencana target kinerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaan unit kerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2024 sebesar Rp. 32.658.274.000. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan unit kerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | | |
|----|--|--|--|----------------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Penyelenggaraan Advokasi | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan | Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *) | | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| 5. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih | | 35 | 35 | 40 | 40 |
| | | | Jumlah petugas Rehabilitasi | | 15 | 15 | 20 | 20 |

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | | |
|-----|---|---|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | yang tersertifikasi kompetensi teknis | | | | | |
| 6. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 7. | Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi | Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika | Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*) | | - | - | - | - |
| 8. | Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | | 15 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*) | | - | - | - | - |
| 9. | Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika | Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Penyidikan Tindak Pidana Pencucian | Meningkatnya pengungkapan kasus | Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil | | - | - | - | - |

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | | | | |
|-----|--|--|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika | pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika | tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*) | | | | | |
| 11. | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNNP | | 92 | 92 | 93 | 93 |
| | | | Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP | | 94 | 94 | 94 | 94 |
| | | | Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target | | 6 | 6 | 6 | 6 |

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp) | | | | |
|----|---|--|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | | 1.242.476.000 | 1.242.476.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| 2. | Penyelenggaraan Advokasi | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | | 418.470.000 | 418.470.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 3. | Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi | | 1.735.126.000 | 1.735.126.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 4. | Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan | Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" | | 237.000.000 | 237.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| | | | Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *) | | | | | |
| 5. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi | Meningkatnya kapasitas | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM | | 271.839.000 | 271.839.000 | 300.000.000 | 350.000.000 |

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp) | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Pemerintah | tenaga teknis rehabilitasi | yang terlatih | | | | | |
| | | | Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis | | | | | |
| 6. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi | | 927.644.000 | 927.644.000 | 980.000.000 | 980.000.000 |
| | | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi | | | | | |
| | | | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP | | | | | |
| 7. | Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi | Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika | Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*) | | 100.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 8. | Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 | | 1.015.823.000 | 1.015.823.000 | 1.300.000.000 | 1.500.000.000 |
| | | | Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*) | | | | | |
| 9. | Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika | Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan | | 403.995.000 | 403.995.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
| | | | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan | | | | | |

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp) | | | | |
|-----|---|--|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | non narkotika | | | | | |
| 10. | Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika | Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika | Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*) | | - | - | - | - |
| 11. | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNNP | | 289.106.000 | 289.106.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
| | | | Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target | | | | | |
| 12. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP | | 832.658.000 | 832.658.000 | 900.000.000 | 900.000.000 |
| | | | Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target | | | | | |

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2024

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT | KOMPONEN/SUB KOMPONEN |
|-----------|-------------------------------------|--|--|---|
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i> | 051. Pengembangan keterampilan hidup (softskill) di SMP dan SMU sederajat |
| 2. | Penyelenggaraan Advokasi | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi | Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba | 051. Pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba a. Rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba b. Koordinasi dalam rangka penguatan pelaksanaan advokasi P4GN di BNNK c. Koordinasi dalam rangka penguatan pelaksanaan advokasi P4GN di BNNK |
| 3. | Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi | Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba | 051. Pembinaan teknis 052. Pemetaan kelompok sasaran di instansi pemerintah 053. Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di instansi pemerintah |
| | | | | 054. Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di instansi pemerintah 056. Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman |

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT | KOMPONEN/SUB KOMPONEN |
|----|--|---|---|--|
| | | | | narkoba di lingkungan swasta 057. Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan swasta 059. Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan masyarakat 060. Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan masyarakat 062. Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan pendidikan 064. Monitoring dan evaluasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba di lingkungan pendidikan |
| | Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | 1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *) | Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika | 052. Pemetaan kawasan rawan 053. Pengembangan kapasitas pada kawasan rawan narkoba 054. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat |
| 5. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis | Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis | 051. Pelatihan petugas rehabilitasi berbasis masyarakat 051. Monitoring petugas rehabilitasi 053. Peningkatan kompetensi teknis petugas rehabilitasi 054. Sertifikasi petugas rehabilitasi |
| 6. | Penguatan Lembaga | 1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar | Lembaga rehabilitasi yang operasional | 051. Pembinaan Teknis 052. Bimbingan teknis dan asistensi fasilitas rehabilitas |

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT | KOMPONEN/SUB KOMPONEN |
|-----------|---|--|--|---|
| | Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP | | 053. Koordinasi Kelembagaan 054. Layanan klinik pratama 055. Monitoring fasilitas rehabilitasi |
| | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi | Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk | 051. Pemetaan dan koordinasi 052. Pembentukan unit IBM 053. Supervisi dan asistensi 054. Operasional unit IBM |
| 7. | Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi | Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*) | Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba | 051. Pengumpulan informasi intelijen A. Pemetaan informasi jaringan intelijen |
| 8. | Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 | Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba | 051. Pembinaan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba 052. Penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba |
| 9. | Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan | Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non-narkoba | 051. Pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non narkoba A. Penerimaan barang bukti B. Pengeluaran barang bukti |
| | | Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba | Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU | 051. Pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba 052. Penyelenggaraan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkoba |
| 10. | Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba | Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21*) | Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba | - |

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT | KOMPONEN/SUB KOMPONEN |
|-----------|--|---|--|---|
| 11. | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | 1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Koordinasi Penyusunan RKA |
| | | | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Penyusunan Laporan |
| | | | | |
| | | | | |
| 12. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target | Layanan Manajemen Keuangan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi |
| | | | Layanan Perkantoran | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional Perkantoran |
| | | | | |
| | | | | |